

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berbagai macam pihak sebagai berikut :

1. Menurut penelitian Dewi dan Jati (2014) yang berjudul Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. Variabel dalam penelitian ini, tax avoidance sebagai variabel dependen, risiko perusahaan, ukuran perusahaan, multinational company, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit sebagai variabel independent. Hasil dari penelitian ini, bahwa hanya terdapat tiga variabel yang berpengaruh terhadap tax avoidance perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Variabel tersebut antara lain risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit. Sedangkan sisanya yaitu ukuran perusahaan, multinational company, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan.
2. Menurut penelitian dari Tandean (2015) yang berjudul Pengaruh *Good*

3. *Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance.*

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan konstitusional, Independensi Auditor, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan, Variabel Dependen dari penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Hasil dari penelitian ini Setelah melakukan pengujian bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga semakin banyak jumlah komite audit maka akan mengurangi tindakan *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam mengurangi tindakan *tax avoidance* dan tidak sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini. Variabel kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Menurut penelitian dari Winata (2015), yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Konstitusional, Prosentase Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Jumlah Komite Audit, variabel dependen dari penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Hasil dari penelitian ini adalah *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan prosentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Judul | Variabel | Hasil |
|-----|-------------------------|--|---|--|
| 1. | Dewi dan Jati (2014) | Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia | Variabel Independen: risiko perusahaan, ukuran perusahaan, multinational company, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> | Hanya terdapat tiga variabel yang berpengaruh terhadap tax avoidance perusahaan. Variabel tersebut antara lain risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit. Sedangkan sisanya yaitu ukuran perusahaan, multinational company, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance yang |

| | | | | |
|----|----------------|---|---|--|
| | | | | dilakukan perusahaan |
| 2. | Tandean (2015) | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> . | Variabel Independen: kepemilikan konstitusional, Independensi Auditor, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan, Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>). | Komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i> |
| 3. | Winata (2015) | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> . | Variabel Independen: Kepemilikan Konstitusional, Prosentase Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Jumlah Komite Audit, variabel dependen: Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) | Kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan prosentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> |

B. Tinjauan Pustaka

1. *Agency Theory*

Agency theory yang mengasumsikan bahwa setiap manusia memiliki sifat egois. *Agency Theory* ini menimbulkan yang namanya *Agency Problems*, maksud dari *agency problems* adalah masalah yang timbul dalam teori keagenan (*agency theory*). Masalah dari teori keagenan atau *agency problems* pertama kali di eksplor dengan Ross (1973), detail dari teori ini disampaikan pertama kali oleh Jensen dan Meckling (1976). Mereka berpendapat bahwa manager dalam perusahaan adalah agen (*agents*) dan *shareholder* merupakan *Principal*. Konflik yang sering terjadi dalam teori ini adalah konflik yang terjadi antara agen dan principal (Solomon, 2007).

Manajemen bertindak sebagai mesin penggerak dalam perusahaan yang bertugas mengatur jalannya perusahaan tergantung dari pihak manajemennya, keinginan sebagai pihak manajemen pastinya menginginkan laba yang tinggi agar dapat dinilai kinerjanya dikatakan baik. Sedangkan para pemegang saham, menginginkan profit yang tinggi yang lebih nyata dengan menekan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Perbedaan pendapat antara manajemen dan pemegang saham dapat dikatakan sebagai *agency problem*. Untuk mengatur kesenjangan yang terjadi dari kedua belah pihak maka, manajemen dan pemegang saham maka dilakukannya *aggressive tax avoidance* hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kepentingan kedua belah pihak. Dari perihal diatas dalam teori keagenan atau *agency theory*

manusia memiliki sifat ingin menang sendiri/egois untuk mencapai apa yang diinginkan.

2. *Good Corporate Governance*

Menurut Surat keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan pembinaan BUMN No. 23/M-PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan perseroan (PERSERO), *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap perusahaan iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Perusahaan yang menerapkan GCG menambah kepercayaan sendiri baik dari pihak pemberi modal (investor) maupun pihak pengonsumsi barang atau jasa perusahaan.

Istilah *governance* berasal dari bahasa Perancis Kuno *gouvernance* yang berarti pengendalian atau kontrol sehingga keadaan berada dalam kondisi terkendali (*the state of being governed*). Untuk pertama kalinya pada tahun 1992 Cadbury Committee membuat Cadbury Report. Komite tersebut

mendefinisikan *corporate governance* sebagai system yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Subroto, 2005). Tata kelola perusahaan ini dilakukan agar ada perbedaan antara tugas masing-masing pemegang kekuasaan perusahaan, dilakukan untuk mengurangi kecurangan dan perbuatan semena-mena masing masing divisi yang ada dalam perusahaan serta meningkatkan kualitas dari perusahaan tersebut. Dalam penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Menurut (KNKG, 2004) perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia wajib memiliki:

1) Komisaris Independen

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance*, komisi independen adalah anggota komisaris yang tidak terafisiasi dengan manajemen, anggota dewan, komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau tindakan semata-mata demi kepentingan perusahaan.

2) Komite audit

Bertugas untuk pengawasan pengelolaan perusahaan, memberikan kepastian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi, dan memberikan kepastian mengenai pengendalian internal, serta menindaklanjuti penyimpangan dalam bidang keuangan.

3) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Kepemilikan institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individu.

4) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.

5) Dewan Komisaris

Menurut KNKG dewan komisaris bertugas untuk bertanggung jawab secara kolektif melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan *good corporate governance*.

a. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Sudharmono (2004) Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dengan prinsip-prinsip negara-negara lain berbeda. Untuk lebih memberikan pemahaman tentang apa itu *Good Corporate Governance*, kita perlu mendapatkan penjelasan tentang apa itu prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam keputusan tersebut meliputi :

- a. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

- b. Kemandirian (*Independence*), yaitu suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
- d. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (*Fainess*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Manfaat *Corporate Governance*

Menurut Soegoto (2010) dalam bukunya, Penerapan *corporate governance* yang baik akan memberikan keuntungan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan dalam komunikasi
- 2) Meningkatkan citra perusahaan
- 3) Meningkatkan kinerja perusahaan
- 4) Meningkatkan *corporate value*
- 5) Meningkatkan kepercayaan investor
- 6) Memeroleh kepercayaan investor

- 7) Memeroleh kepercayaan dari kreditor
- 8) Memeroleh kepercayaan pelanggan
- 9) Meningkatkan efisiensi
- 10) Mencegah penyalahgunaan wewenang
- 11) Perusahaan makin kompetitif
- 12) Terjadi *Sustainable Growth*

Good Corporate Governance memberikan kontribusi dapat dijadikan alternatif penting meningkatkan kualitas proses bisnis melalui informasi yang dihasilkan serta peranannya sebagai *performance driver*, *performance measurement*. Praktik GCG dalam perusahaan begitu penting sehingga tidak hanya di Indonesia saja praktik ini dilakukan, negara-negara bagian barat juga melakukan praktik GCG ini. Penerapan GCG diyakini memberikan dampak yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan suasana bisnis yang sehat, daya saing yang lebih kuat, menghindari penyimpangan-penyimpang yang terjadi serta pencegahan terhadap korupsi dan masalah lain yang dapat merugikan perusahaan.

3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak dikenal masyarakat sebagai tindakan pengurangan jumlah beban pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak terutama wajib pajak badan untuk meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan. Penghindaran pajak dan penggelapan pajak menjadi hal yang sangat berpengaruh

dikehidupan sosial dan ekonomi, yang mempunyai tujuan utama sebagai pengurangan pembayaran pajak.

Pengertian penghindaran pajak menurut Brown (2012), penghindaran pajak melibatkan penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat, atau pengurangan secara tidak disengaja oleh hukum pajak. itu adalah manipulasi yang tidak dapat diterima hukum yang tidak seperti mitigasi pajak yang sah. mitigasi melibatkan penggunaan hukum pajak untuk mencapai keuntungan pajak diantisipasi tertanam dalam ketentuan pajak. penghindaran pajak juga harus dibedakan dari penggelapan pajak. penggelapan melibatkan penipuan langsung, penyembunyian, atau keliru untuk mengalahkan penerapan undang-undang pajak.

Penghindaran pajak dalam perusahaan - perusahaan lebih memilih melakukan penghindaran pajak yang agresif. Perusahaan biasanya melakukan tindakan tersebut untuk masa depan perusahaan. Pemerintah tidak tinggal diam menyikapi masalah ini, seperti yang diketahui pajak merupakan pendapatan negara terbesar. Pembangunan didalam negeri sebagian besar dari pendapatan negara dari pajak, maka dari itu pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan untuk mengatasi masalah penghindaran pajak.

Menurut Uppal dan Reksohadiprodjo (1999); Sour (2001) dalam Rahayu (2010), menjelaskan bahwa motif dari praktik penghindaran ataupun penggelapan pajak di Indonesia disebabkan beberapa faktor antara lain, kurangnya pendidikan, rendahnya pengawasan dan *law enforcement*, kinerja

pemerintah dan faktor eksternal, yaitu regulasi. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan penerimaan negara disektor perpajakan.Selain itu, pentingnya pemeriksaan dan penyempurnaan peraturan juga perlu dilakukan, dengan dukungan pihak-pihak yang bersangkutan untuk baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri.

Pembuktian penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia seperti yang dilansir dalam www.pajak.go.id (2013), Pertama, *benchmarking* kewajaran nilai biaya beban umum seperti *royalti offshore licensing* dan jasa manajemen. Apa ada perbedaan tarif jasa manajemen dan royalti antara Indonesia dengan negara lain untuk perusahaan yang sama. Perusahaan *consumer goods* di India hanya membayar royalti 1,4sampai 3,15 persen di tahun 2012, sementara di Indonesia antara 5-8 persen. Biaya royalti dan jasa manajemen yang tinggi bisa dianggap sebagai dividen, selain tentunya merugikan investor minoritas.Kedua, perlu ada aturan pencabutan izin suatu usaha Penanaman Modal Asing jika dalam waktu sekian tahun rugi terus menerus tapi terus beroperasi. Ketiga, meninjau ulang perjanjian perhindaran pajak berganda (P3B) dengan negara-negara tempat domisili holding company yang memiliki anak usaha di Indonesia, seperti Singapura, Jepang, Korea, China dan negara Eropa. Keempat, perlu kesepakatan pertukaran data keuangan perbankan dengan negara anggota OECD, untuk mengejar data keuangan para penghindar pajak, seperti yang dilakukan parlemen Uni Eropa.Kelima, pembatasan tarif bunga pinjaman ke perusahaan induk.

Dari beberapa literatur penghindaran pajak banyak dilakukan di perusahaan - perusahaan di Penanaman Modal Asing (PMA). Banyaknya peluang untuk melakukan penghindaran pajak terdapat beberapa skema penghindaran pajak yang marak dilakukan perusahaan PMA diantaranya, *Transfer Pricing*, Pemanfaatan *Tax Haven Country*, *Thin Capitalization*, *Treaty Shopping*, *Controlled Foreign Corporation* dan lain-lain.

Pemerintah di Indonesia membuat kesepakatan untuk menangkal praktik penghindaran pajak guna meminimalkan kerugian negara. Kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan pemerintah antara lain, penangkalan praktik *Thin Capitalization* melalui penentuan besaran *Debt Equity Ratio (DER)*, regulasi praktik pemanfaatan *Tax Haven Country* melalui kebijakan Dividen perusahaan, Regulasi praktik *Transfer Pricing* melalui perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) wajib pajak dengan hubungan istimewa, praktik *Treaty Shopping* melalui penerapan fasilitas *Tax Treaty* antara Indonesia dan Negara mitra perjanjian dan lain-lain

4. Pengukuran *Corporate Governance*

a. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial ini berarti kepemilikan yang dimiliki oleh pihak manajemen yang dikelola perusahaan.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris oleh undang-undang dan anggaran dasar Perusahaan memberikan kewenangan tertentu kepadanya. Kewenangan ini, antara lain memasuki kantor perusahaan, mendapatkan laporan direksi dan memeriksa dokumen perusahaan, menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, serta memberhentikan sementara direksi dan mengurus perusahaan dalam hal perusahaan tidak memiliki direksi.

Fungsi Dewan Komisaris (Dekom) termasuk anggota komisaris Independen adalah mencakup dua peran berikut, mengawasi Direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam *business plan* dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan, dan memantau penerapan dan efektivitas dari praktik GCG (Sutedi, 2015). Dewan komisaris sebagai pengawas dan berhak memberikan saran atas kinerja perusahaan, dalam konteks ini dewan komisaris dapat memeriksa dengan bantu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan didalam kinerja perusahaan. Professional masing-masing divisi dalam perusahaan menjadi hal yang dapat menentukan nasihat yang keluar dari dewan komisaris.

Menurut buku dari Widjaja (2008), tugas pengawasan inilah yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Inilah yang merupakan *fiduciary duty* dewan komisaris terhadap perseroan. Sedikit berbeda dari direksi yang mewakili perseroan dalam tindakan ke luar, dewan komisaris dalam tugas pengawasannya sama sekali tidak melakukan fungsi perwakilan. Keputusan yang diambil dewan komisaris digunakan sebagai bahan referensi perusahaan untuk membangun kinerja perusahaan.

c. Komite Audit

Surat Edaran Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) No: SE-03/PM/2000 yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten dan Surat Direksi BEJ (Bursa Efek Jakarta) No: Kep. 339/BEJ/07-2001 mengenai kewajiban perusahaan tercatat untuk memiliki Komite Audit serta jumlah keanggotaan dari komite itu sendiri. Pada tahun 2003, keberadaan Komite Audit untuk BUMN terdapat dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 yang berisi bahwa dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bertugas :

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal sehingga

dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar;

2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya;
3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham;
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Komite Audit merupakan sebuah fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia, Salah satu perusahaan Korea, Samsung, mendirikan Komite Audit pada tahun 2000. Komite Audit di dalam perusahaan Samsung adalah sebuah komite yang bertugas di bawah Direksi yang mengawasi dan mendukung manajemen agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan melalui checks and balances. Komite Audit terdiri dari tiga *directors* (direktur), lebih dari dua pertiga di

antaranya harus berasal dari *independent directors*. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, beberapa rekomendasi untuk memperkuat GCG menurut Tampubolon (2006), yaitu dengan membentuk komite audit, pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Dewan komisaris dan direksi sebaiknya terdiri dari kombinasi antara direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif yang independen.
- 2) Komite audit harus independen, sekurang terdiri dari tiga anggota, dimana salah seorang dari mereka harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi.
- 3) Komite audit harus mengadakan rapat sekurangnya empat kali dalam setahun, dengan korum apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota.
- 4) Komite audit harus diberi wewenang untuk melakukan investigasi ke semua kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup pekerjaannya, untuk mencari atau mendapatkan informasi dari pegawai yang mana pun, dan untuk meminta nasihat dari profesi di luar perusahaan seperti penasihat hukum.
- 5) Dengan kewenangan yang dimilikinya, komite audit harus membangun proses audit intern yang profesional, objektif dan independen.

Komite audit dibentuk untuk mengevaluasi serta memeriksa semua kinerja dari masing-masing divisi yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya komite audit diyakini dapat membantu kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu fungsi komite audit ialah membantu dewan komisaris melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja dari perusahaan tersebut. Peran dan tanggung jawab komite audit sangat vital dalam pelaksanaan GCG, peran dan tanggung jawab komite audit antara lain, sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap proses penerapan *corporate governance*.
- 2) Memastikan bahwa manajer senior secara aktif mensosialisaikan budaya *corporate governance*.
- 3) Memonitor bahwa *code of conduct* telah dilaksanakan secara konsekuen.
- 4) Memahami semua pokok persoalan dan isu yang mungkin dapat memengaruhi kinerja finansial maupun non finansial perusahaan.
- 5) Memantau bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan *corporate governance* dan temuan lainnya.

Oleh sebab itu, secara singkat fungsi komite audit adalah untuk menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Fungsi

lainnya adalah untuk memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajer hingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap adanya kontrol internal yang lebih baik (Sulistiyanto, 2008).

d. Kualitas Audit

Sampai saat ini kualitas audit yang baik itu tidak dapat diartikan secara jelas. Kualitas audit dilihat seberapa independensinya auditor yang digunakan oleh perusahaan. Didunia, terdapat empat KAP yang paling berpengaruh dan terkenal, yang jasanya paling banyak digunakan oleh klien. Empat KAP itu dikenal dengan sebutan *The Big Four Auditors*. Kantor akuntan *The Big Four* merupakan kantor akuntan internasional terbesar di dunia yaitu, *PricewaterhouseCoppers*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *Ernst & Young*, dan *KPMG* (Dewi, 2010).

C. Hipotesis

Good Corporate Governance (GCG) dalam penelitian ini memiliki indikator kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Kepemilikan manajerial atau yang bisa disebut investor manajerial ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja manajemen agar mendapatkan hasil kerja yang maksimal dari pihak manajemen. Perusahaan mengambil keputusan untuk pihak manajemen mengambil andil dalam kepemilikannya terhadap perusahaan.

Hal ini juga berguna untuk memonitoring didalam perusahaan untuk kinerja perusahaan sendiri. Tentunya semakin banyak kepemilikan manjerialnya maka perusahaan dapat di kontrol secara internal.

Hasil penelitian yang dilakukan Pramudito dan Ratna Sari (2015), bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak kepemilikan manajerial perusahaan, maka semakin rendah perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak.

H_{1a} : Semakin banyak kepemilikan manajerial, semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafisiasi dengan manajemen, anggota dewan, komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau tindakan semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Tugas dari dewan komisaris untuk menjaga serta memonitoring tugas yang dilakukan direksi memberikan masukan terhadap kinerja direksi maka dari itu untuk menjaga terjadinya kecurangan yang dilakukan pihak direksi maka dewan komisaris yang tidak berhubungan sama sekali dengan perusahaan lebih baik di tugaskan untuk memonitoring pihak direksi, bukan hanya dewan komisaris independen tetapi dewan komisaris internal juga mengambil andil agar tidak terjadi kesalahpahaman antar tugas dewan komisaris.

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012), semakin besar prosentase variabel PDK dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam

sebuah perusahaan oleh direksi dan manajemen, sehingga keberadaan mereka tidak hanya formalitas belaka. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, semakin kecil perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak.

H_{1b} : Semakin banyak dewan komisaris independen, semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak

Komite Audit adalah sebuah organisasi kecil dalam perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditanggung oleh dewan komisaris. Komite audit berfungsi sebagai pemeriksa fungsi direksi apakah sudah berjalan baik atau belum dalam perusahaan. Dalam perusahaan komite audit menjadi peran yang sangat penting untuk membantu dewan komisaris. Banyaknya masalah internal perusahaan akan terasa terbantu oleh adanya komite audit untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Menurut Watts dan Zimmerman (1983) dalam Tandean (2015), tanggungjawab komite audit dalam bidang corporate governance adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Dengan terbentuknya komite audit menjadikan performa auditor menjadi lebih independen dikarenakan praktek kolusi antara manajemen dengan auditor menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

Menurut penelitian dari Winata (2015), hasil dari penelitiannya bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam hal penghindaran pajak

komite audit memperbaiki kinerja perusahaan, masing-masing bagian diperiksa dan dilakukan perbaikan. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) No: SE-03/PM/2000 yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten, minimal memiliki 3 orang komite audit, serta peraturan yang di berlakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan untuk memperkecil pajak perusahaan tetapi semakin banyak komite audit semakin rendah kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut, jika jumlah komite audit rendah maka tingkat kebijakan penghindaran pajak semakin tinggi.

H_{1c} : Semakin banyak komite audit, semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak

Kualitas audit laporan keuangan perusahaan sangat penting dilakukan perusahaan yang melakukan *good corporate governance*, inti dari GCG yaitu, transparansi. Kantor Akuntan Publik (KAP) kebanyakan “*job*” pada saat perusahaan melakukan pemeriksaan laporan keuangannya, transparansi yang dituntut pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan mengukur kualitas audit dinilai dari ukuran KAP.

Penelitian yang dilakukan oleh Asfiyati (2012) dalam Dewi dan Jati (2014), hasil dari penelitiannya bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan

dengan auditor yang termasuk dalam *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan.

Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (*Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young*) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Dalam kualitas audit semakin baik kualitas audit atau opini laporan keuangan perusahaan diperiksa dalam KAP *The Big Four* lebih diperhitungkan oleh investor, dalam penilaian auditnya KAP *The Big Four* kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

H_{1d} : Semakin banyak kepemilikan manajerial, semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak

Berdasarkan sejumlah hipotesis yang telah dipaparkan diatas, maka variabel *good corporate governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dilihat dari indikator-indikator yang digunakan untuk memperbaiki sistem yang dilakukan perusahaan agar memerangi melakukan penghindaran pajak. Dalam peran sebagai sistem untuk memperbaiki perusahaan tentunya GCG mampu mebantu perusahaan agar terhindar dari praktek penghindaran pajak.

H1 : Semakin baik *corporate governance* suatu perusahaan, semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

D. Kerangka Pemikiran



